

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah kejadian yang menyebabkan kerugian, kerusakan, atau penderitaan yang meluas dan seringkali melibatkan jumlah besar orang. Definisi bencana menurut UU No. 24/ 2007 adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, dan manusia yang menghasilkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. Bencana dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kejadian alam, tindakan manusia, atau kombinasi keduanya. Contoh bencana alam meliputi gempa bumi, banjir, badai, letusan gunung api, dan kekeringan, sementara bencana manusia mencakup perang, kecelakaan industri, kebakaran, atau kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Dampak bencana seringkali sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan, mitigasi, dan respons terhadap bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampaknya. Banyak organisasi dan pemerintah bekerja keras untuk mengembangkan strategi dan sistem yang efektif dalam menghadapi bencana, termasuk perencanaan tanggap darurat, evakuasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana. (Cahyono, P Warsito, Andayani, & H Darwanto, 2015)

Kajian kebencanaan selama ini banyak berfokus pada jenis kebencanaan yang umum atau lebih terpublikasikan, seperti gempa bumi atau banjir, daripada kebakaran lahan yang sering terjadi di Pulau Kalimantan, terutama di Kabupaten Bulungan. Kebakaran lahan seringkali kurang mendapat sorotan media karena dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di wilayah tersebut. Namun, dengan adanya inisiatif dari BPBD Kabupaten Bulungan untuk mengembangkan program baru mitigasi kebakaran lahan, diharapkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi kebakaran dapat meningkat di masyarakat setempat. (Syarifah, Poli, Ali, Rahmat, & Widana, 2020)

Menurut (Pratiwi, Irsyad, Kurniawan, Agustian, & Negara, 2021) Bencana kebakaran merupakan kejadian di mana api menyebar dengan cepat dan merusak secara besar-besaran, mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap properti, lingkungan, dan bahkan nyawa manusia. Kebakaran dapat terjadi di berbagai lokasi, seperti bangunan perkotaan, hutan, lahan

pertanian, atau fasilitas industri. Penyebab kebakaran dapat bervariasi, mulai dari faktor manusia seperti kelalaian atau kesalahan dalam penggunaan peralatan hingga faktor alam seperti petir atau cuaca ekstrem seperti kekeringan dan angin kencang. Dampak dari kebakaran dapat sangat merusak, meliputi kerugian harta benda yang besar, kerugian ekonomi bagi individu dan komunitas, kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang, serta risiko yang serius terhadap kehidupan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan kebakaran, seperti edukasi tentang penggunaan yang aman dari peralatan listrik dan tindakan preventif lainnya, serta respons yang cepat dan efektif saat terjadi kebakaran, menjadi sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.

Upaya-upaya penanganan bencana kebakaran sering kali terfokus pada peran organisasi pemadam kebakaran, petugas keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memitigasi risiko kebakaran. Namun, peran BPBD dalam menghadapi bencana kebakaran juga sangat penting namun sering kali kurang mendapat sorotan yang memadai. BPBD memiliki tanggung jawab yang luas dalam koordinasi, perencanaan, dan respons terhadap bencana, termasuk kebakaran. Oleh karena itu, perlu lebih banyak perhatian dan penelitian mengenai upaya BPBD dalam menangani bencana kebakaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi langkah-langkah penanganan bencana secara keseluruhan.

BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaporkan 95 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2022. Oleh karena itu, BPBD akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan bencana ini. Secara rinci, karhutla di tahun 2022 mencakup 17 kejadian di Kota Tarakan, 20 kejadian di Kabupaten Bulungan, 50 kejadian di Kabupaten Malinau, dan 8 kejadian di Kabupaten Nunukan. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung tidak mengalami karhutla (Nasrul, 2023).

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan selama Juli hingga awal Agustus 2023, terdapat 12 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BPBD Bulungan, Rafidin, menyatakan bahwa sejak awal tahun 2023 hingga pertengahan Agustus, terdapat sejumlah lahan milik warga maupun yang tidak diketahui pemiliknya terbakar. Ukuran lahan yang terbakar bervariasi, dengan luas terkecil 2 hektare dan terbesar mencapai 20 hektare. Dalam seminggu terakhir, kondisi cuaca panas di Kabupaten Bulungan mencapai 34 derajat Celsius (Zakaria, 2023). Adapun Kejadian Karhutla di Kabupaten Bulungan Juli-Agustus 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kejadian Karhutla di Kabupaten Bulungan Juli – Agustus 2023

Lokasi Kejadian	Luas Lahan Terbakar
Desa Gunungsari	2,5 hektar
Jelarai Raya	1,5 hektar
KM 6 (Poros Bulungan – Berau)	10 hektar
Desa Bumi Rahayu	2 hektar
Desa Tanjung Agung	12 hektar
Desa Wonomulyo (PT. DISL)	10 hektar
Desa Wonomulyo (PT. TBP)	10 hektar

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak kebakaran hutan di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki upaya mitigasi bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bulungan. Data dari BPBD Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir, kebakaran hutan sering terjadi akibat perubahan cuaca panas, yang menyebabkan kebakaran hutan di beberapa lahan di Kabupaten Bulungan.

BPBD merupakan badan pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab dalam membantu Presiden RI dalam penanganan bencana secara terpadu. Tugas dan fungsi BPBD meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan dalam menghadapi berbagai jenis bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya. Keberadaan BPBD sangat penting karena Indonesia memiliki potensi besar terjadinya berbagai bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung api, kekeringan, angin topan, kebakaran, tanah longsor, dan wabah penyakit, yang membutuhkan koordinasi dan upaya bersama untuk penanganan yang efektif (Syarifah et al., 2020)

BPBD Kabupaten Bulungan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kabupaten Bulungan No. 2 / 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bulungan serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan kepadanya. Regulasi ini menjadi dasar penting bagi BPBD Kabupaten Bulungan dalam menjalankan tugasnya. Sistem pemantauan dan informasi terkait kebencanaan, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga wabah pandemi COVID-19, memerlukan laporan yang akurat untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam menghadapi dan merespons berbagai situasi darurat dan bencana yang mungkin terjadi (Admin & Tolapa, 2020). Informasi tersebut dapat menjadi referensi yang berharga bagi semua pihak, termasuk instansi pemerintahan, non-pemerintahan, dan masyarakat, dalam

menjalankan program dan kegiatan terkait penanganan bencana. Model informasi yang mencakup penanganan prabencana dan pascabencana dapat memberikan panduan yang komprehensif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi langkah-langkah mitigasi, respons, dan pemulihan terhadap berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi.

Bidang dalam struktur BPBD yang fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertugas untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, dengan tujuan mengurangi risiko dan dampak bencana. Salah satu tugas utama bidang ini adalah mengelola informasi terkait bencana dan menyebarkannya kepada pejabat yang berwenang serta masyarakat melalui media sosial, yang menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Selain itu, bidang ini juga merancang upaya-upaya yang dapat membantu meminimalisir resiko saat terjadi bencana, serta menyiapkan langkah-langkah dalam penanganan saat bencana terjadi dan pemulihan pasca bencana. Dengan demikian, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam BPBD memiliki fungsi yang holistik dan integral dalam mengelola berbagai aspek terkait bencana alam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat efektifitas dari program MPA dan kendala alami dalam menjalankan program pembentukan MPA ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari program MPA.
2. Mengetahui faktor-faktor apasaja yang menjadi kendala pada saat menjalankan program pembentukan MPA
3. Memberikan sedikit saran dan juga masukan dari hasil penelitian untuk menjalankan program ini dengan baik kedepannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kajian yang akan dilakukan, maka terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga dan sumber pengetahuan yang signifikan terkait tingkat optimalisasi program MPA. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan tema yang penulis teliti, serta dapat menjadi landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam dunia ilmu pengetahuan, menjadi acuan untuk penelitian yang lebih mendalam, dan menjadi sub tema yang relevan dalam penelitian-penelitian mendatang. Upaya ini sangat penting dalam memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan pengetahuan di masa depan.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang berguna dalam menyampaikan pengetahuan penulis terkait tingkat optimalisasi program ini dan strategi pelaksanaannya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memahami perspektif instansi terkait mengenai kinerja yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

2). Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan saat ini dan di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini akan menjadi referensi penting dan dapat dievaluasi oleh berbagai pihak, termasuk instansi terkait, dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, penelitian ini di Kabupaten Bulungan dapat digunakan sebagai alat evaluasi jika terjadi kesalahan teknis atau kekurangan dalam pelaksanaan program.

3). Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga untuk memperluas wawasan ilmiah, terutama bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan optimalisasi program MPA di Kabupaten Bulungan. Proses pengembangan bidang keilmuan ini dapat mengenrich pengetahuan dalam berbagai aspek ilmu, serta menjadi dasar bagi pengembangan tema dan bahan tinjauan dalam penelitian yang lebih lanjut.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Inovasi pemerintah daerah

Inovasi sering diartikan sebagai perubahan dalam perilaku atau pendekatan baru dalam suatu konteks tertentu. Rogers (2003: 12) terkait erat dengan lingkungan yang dinamis dan berkembang, di mana ide, praktik, atau objek baru dianggap sebagai inovasi oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya. Konsep inovasi menurut Suryani (2008:304) tidak terbatas pada produk saja, tetapi juga mencakup ide, metode, atau hal baru lainnya yang dipersepsikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sesuatu yang baru dan berguna. Dalam praktik pemerintahan, gagasan inovatif dapat muncul dari berbagai sumber, tidak hanya dari birokrasi, tetapi juga dari lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta.

Inovasi dalam pemerintahan dimulai dengan pengenalan dan identifikasi pemerintah terhadap perannya dalam sistem yang sedang berlangsung. Inovasi ini tidak hanya terbatas pada ranah administrasi, tetapi juga melibatkan aspek politik dan hukum yang terintegrasi. Dalam konteks ini, pemerintahan dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan hubungan antara proses politik, hukum, dan administrasi. Peran aktual pemerintah dalam sistem tersebut sangat penting. Ketika pemerintah dilihat sebagai penguasa dan masyarakat sebagai objek yang dikuasai, kemungkinan terjadinya inovasi dan kreativitas akan terbatas. Namun, jika pemerintah dilihat sebagai produsen layanan dan masyarakat sebagai pelanggan, birokrasi pemerintah akan terdorong untuk terus meningkatkan diri dan layanannya demi memberikan kepuasan kepada masyarakat.

1.5.2 Strategi Pemerintah

Strategi pemerintah mencakup serangkaian langkah yang diambil untuk mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan keputusan politik guna mencapai visi, misi, dan prioritas yang telah ditetapkan. Strategi ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap tantangan, peluang, dan kebutuhan masyarakat yang dihadapi oleh negara tersebut. Secara konseptual, strategi pemerintah melibatkan penentuan tujuan jangka panjang dan sasaran yang spesifik, serta perancangan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Menurut Richard Whittington (2003), seorang ahli manajemen strategis, strategi pemerintah adalah rencana jangka panjang yang melibatkan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam konteks yang dinamis. Sementara menurut John M. Bryson (2005), strategi pemerintah merupakan serangkaian

keputusan, tindakan, dan alokasi sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang ada.

1.5.3 Masyarakat Peduli Api (MPA)

MPA merupakan bentuk kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan dan pengendalian kebakaran, khususnya kebakaran hutan. Pola kemitraan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan terkait. Peran khusus dan tugas yang penting bagi MPA adalah terlibat langsung dalam pengendalian kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya, terutama saat kebakaran hutan terjadi secara langsung.

1.6 Definisi Operasional

Dalam rangka memudahkan penelitian, diperlukan pembatasan dan fokus penelitian yang dapat diukur melalui beberapa indikator berikut ini:

1.6.1 Program Masyarakat Peduli Api (MPA)

Strategi pemerintah dalam menjalankan program MPA memiliki empat ciri yang mencakup:

- 1). Suatu strategi memiliki kekhasan atau khusus yang mencakup program, ide, sistem, tatanan, atau hasil yang dicapai yang berdampak positif bagi masyarakat peduli api di daerah tersebut. Kekhasan ini bisa terlihat dari inovasi dalam metode pelaksanaan program, efektivitas dalam mencapai tujuan, serta adaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan respons terhadap bahaya kebakaran.
- 2). Suatu strategi memiliki unsur kebaruan yang tercermin dari kreativitas dan pemikiran yang orisinal, menghasilkan solusi atau pendekatan yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya.
- 3). Strategi yang efektif haruslah memiliki program yang terencana dengan baik, yang artinya semua kegiatan dan langkah-langkahnya telah direncanakan dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang diinginkan. Dalam hal ini, program tersebut juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam untuk masyarakat yang menjadi targetnya.
- 4). Untuk mewujudkan strategi yang khas, sebuah program harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Ini mencakup merumuskan arah serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dengan fokus pada menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Program-program yang

dijalankan juga harus bersifat partisipatif, di mana masyarakat secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip yang benar dan tepat.

Strategi pemerintah adalah peta jalan yang diadopsi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan negara secara efektif. Ini melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang didesain untuk menangani tantangan, memanfaatkan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks program MPA, strategi pemerintah harus mampu mengembangkan inovasi sehingga strategi tersebut menjadi efektif dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan strategi pemerintah bervariasi sesuai dengan kebijakan dan prioritas pemerintah yang sedang berkuasa, namun intinya adalah meningkatkan partisipasi aktif dan efektif masyarakat dalam program-program yang ada.

1.6.2 Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana karhutla telah dilakukan dari tahun ke tahun, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat (Havip, Perbawasari, & Rahmat, 2023). Dalam dinamika mitigasi bencana tidak lepas dari dinamika komunikasi dalam pelaksanaannya. Mitigasi bencana adalah langkah-langkah dan strategi yang digunakan untuk mengurangi dampak dan risiko bahaya, melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum, selama atau setelah bencana atau kejadian darurat. Mitigasi bencana merupakan komponen penting dari pemerintah daerah maupun nasional keamanan karena krisis mempengaruhi pembangunan kota dalam jangka panjang (Chirisa, 2020).

1.6.3 Pencegahan

Pencegahan kebakaran hutan adalah serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hutan dan lahan dari kerusakan akibat kebakaran, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah kerugian ekonomi dan sosial (Agustiar, 2019). Pencegahan kebakaran hutan bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melakukan patroli secara berkala di kawasan hutan dan lahan rawan bakar untuk mendeteksi dini potensi kebakaran, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara pencegahannya, membangun jalur hijau di sekitar hutan dan lahan untuk mencegah api menjalar, memastikan ketersediaan sumber air yang memadai untuk pemadaman api,

menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan dan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mendeteksi kebakaran hutan secara dini. Pencegahan kebakaran hutan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, diharapkan kebakaran hutan dapat diminimalisir dan kelestarian alam serta lingkungan dapat terjaga (Qamariyanti, Usman, & Rahmawati, 2023).

1.6.4 Pemantauan

Pemantauan kebakaran hutan adalah proses pengamatan, pendeteksian, dan pengumpulan informasi tentang keberadaan dan perkembangan api di kawasan hutan dan lahan. Pemantauan kebakaran hutan merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan kebakaran hutan. Dengan pemantauan yang efektif, diharapkan kebakaran hutan dapat diatasi dengan lebih cepat dan efisien, sehingga kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

1.6.5 Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi kebakaran hutan adalah upaya untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan, perkembangan, dan dampak kebakaran hutan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Informasi ini dapat berupa lokasi kebakaran, luas area terbakar, penyebab kebakaran, dampak kebakaran, upaya pemadaman, peringatan dan imbauan dan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari kawasan kebakaran, serta imbauan untuk membantu upaya pemadaman api.

Penyebaran informasi kebakaran hutan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Website dan aplikasi khusus tentang kebakaran hutan dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang lebih detail dan terkini. Spanduk dan poster dapat dipasang di tempat-tempat strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Petugas lapangan, seperti petugas pemadam kebakaran dan petugas kehutanan, dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Penyebaran informasi kebakaran hutan merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan. Dengan informasi yang

cepat, akurat, dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat lebih aware terhadap bahaya kebakaran hutan dan dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pemadaman api.

1.6.6 Sosialisasi

Sosialisasi kebakaran hutan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan, cara pencegahannya, dan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, seperti tidak membakar hutan, melaporkan potensi kebakaran, dan membantu upaya pemadaman api, membangun kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam upaya pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan (Ashari, 2024).

Sosialisasi kebakaran hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung melalui pertemuan, seminar, atau pelatihan, melakukan kampanye melalui media massa, media sosial, dan spanduk untuk menyampaikan pesan tentang bahaya kebakaran hutan dan cara pencegahannya, membagikan brosur dan leaflet yang berisi informasi tentang kebakaran hutan kepada masyarakat, melakukan kegiatan simulasi pemadaman api untuk melatih masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan, membentuk kelompok masyarakat peduli api untuk membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (Astuti et.al, 2020).

Sasaran sosialisasi kebakaran hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lebih berisiko mengalami dampak kebakaran hutan, sehingga mereka perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang lebih intensif. Pelajar dan mahasiswa merupakan agen perubahan yang potensial untuk menyebarkan informasi tentang kebakaran hutan kepada masyarakat luas. Petani dan pekebun seringkali menggunakan api untuk membuka lahan, sehingga mereka perlu mendapatkan edukasi tentang cara penggunaan api yang aman dan bertanggung jawab. Aparat pemerintah perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kebakaran hutan untuk dapat

menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Sosialisasi kebakaran hutan merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan kebakaran hutan dapat diminimalisir dan kelestarian alam serta lingkungan dapat terjaga (Junaidy, A., Sandhyavitri, A., & Yusa, 2019).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk memahami strategi yang diterapkan pemerintah dalam mewujudkan program MPA di Kabupaten Bulungan dengan lebih mendalam. Analisis deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Moleong, adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan status kelompok, kondisi, sikap, dan pandangan terhadap suatu fenomena yang ada dalam masyarakat. Melalui analisis ini, data akan diurutkan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pelaksanaan dan dampak strategi pemerintah terhadap Program Masyarakat Peduli Api di daerah tersebut.

1.7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait dalam program MPA di Kabupaten Bulungan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, undang-undang, laporan resmi, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Kombinasi kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai strategi pemerintah dalam mewujudkan MPA serta dampaknya di wilayah tersebut.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Metode pengumpulan data ini melibatkan observasi langsung di lapangan, di mana peneliti

mengamati secara langsung kegiatan dan proses terkait program MPA di Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan komprehensif tentang strategi pemerintah dalam mewujudkan MPA di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber referensi yang meliputi dokumen resmi dari BPBD Kabupaten Bulungan, undang-undang terkait penanggulangan bencana, artikel-artikel jurnal yang membahas topik terkait bencana alam, buku-buku yang relevan dengan strategi pemerintah dalam menghadapi bencana, serta referensi dari internet yang memiliki keterkaitan dengan program MPA dan strategi pemerintah terkait di wilayah tersebut.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data dari dokumen. Meskipun ada metode lain seperti angket, penelitian ini memilih untuk fokus pada observasi di lapangan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang situasi yang ada, wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan perspektif dan informasi yang lebih mendalam, serta analisis dokumen untuk memperoleh data yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memastikan keakuratan dan kedalaman data yang sesuai dengan konteks penelitian (Sukmawan et al., 2021).

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara non-partisipatif, yang berarti peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati dan tetap menjaga jarak dari sistem yang sedang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara objektif dan menghindari pengaruh dari keterlibatan personal atau emosional dalam hasil pengamatan. Observasi non-partisipatif memungkinkan peneliti untuk menjaga keterpisahan antara diri mereka dan fenomena yang diamati, sehingga memungkinkan analisis yang lebih obyektif dan mendalam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua atau lebih individu di mana mereka bertukar gagasan dan informasi melalui pertanyaan dan jawaban. Melalui wawancara, makna tentang suatu topik dapat dikonstruksi dengan lebih mendalam karena memungkinkan adanya dialog langsung

antara peneliti dan narasumber, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sudut pandang dan pengalaman narasumber terkait topik yang dibahas (Ulum, 2018). Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari informan, terutama untuk mengungkapkan situasi dan fenomena yang sulit terdeteksi melalui observasi. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai alat untuk bertanya kepada informan dan mencatat tanggapan mereka. Jenis wawancara terstruktur dipilih karena pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya memastikan konsistensi dalam pengumpulan data, diulang untuk setiap informan yang diwawancarai, sehingga memudahkan analisis dan memastikan keseragaman dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan tertulis, visual, atau rekaman lainnya tentang suatu peristiwa atau informasi yang sudah terjadi atau terkait dengan individu tertentu. Ini dapat berupa teks tertulis, ilustrasi grafis, gambar, atau rekaman audio dan video yang memberikan informasi atau bukti tentang suatu kejadian atau pencapaian (Sugiyono, 2013). Dokumentasi gambar yang menggambarkan dampak langsung dari bencana kebakaran menjadi bagian penting dalam menguatkan hasil observasi dan wawancara dalam konteks penelitian ini. Data visual tersebut memberikan bukti konkret yang mendukung validitas informasi yang diperoleh dari observasi langsung dan interaksi dengan narasumber.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bulungan, dengan fokus khusus pada Kantor BPBD. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan, di mana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan para perangkat daerah terkait di BPBD. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta memenuhi kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data kualitatif digunakan sebagai pendekatan utama. Metode ini melibatkan proses pengolahan, pengorganisasian, dan penafsiran data untuk membentuk satuan data yang dapat dikelola dengan baik. Dalam analisis data kualitatif, peneliti secara aktif mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami

konteks, pandangan, dan pengalaman yang diperoleh dari para informan secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang kaya dan menyeluruh tentang topik penelitian yang sedang dijalani. Disamping itu, menurut Sugiyono (2013) dalam (Dr.M. Sobry Sutikno Prosmala Hadisaputra, 2020) Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan pola-pola penting yang dapat diteliti dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Data ini kemudian dapat dibagi menjadi satuan-satuan yang relevan, dan peneliti akan memilih data mana yang paling penting untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan utama dari analisis data adalah agar peneliti dapat mengambil kesimpulan yang mudah dipahami dan dapat dibagikan kepada orang lain, sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aktivitas dalam menganalisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dengan mendokumentasikan gambaran dampak langsung yang terjadi setelah bencana kebakaran, serta merekam kegiatan fisik dan non-fisik yang terjadi di Kabupaten Bulungan. Dengan cara ini, peneliti memperoleh informasi visual yang dapat digunakan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut terkait dampak dan tanggapan masyarakat terhadap bencana kebakaran. Metode dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk mengabadikan kondisi aktual yang terjadi pasca-bencana, sehingga memperkuat analisis dan pemahaman terhadap peristiwa tersebut.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian ini akan diproses, dianalisis, dan disederhanakan dengan tujuan mengurangi informasi yang tidak relevan serta mengorganisasikan data tersebut untuk mencapai suatu kesimpulan akhir yang dapat diimplementasikan. Proses ini melibatkan langkah-langkah penyusunan data, identifikasi pola atau tema penting, dan pengurutan data agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, data dari wawancara dapat dioptimalkan untuk mendukung analisis dan pembuatan kesimpulan yang lebih solid dalam penelitian ini.

c. Penyajian Data

Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk kalimat dan grafik. Penyajian data ini disusun berdasarkan poin-poin penting dalam ringkasan data, menggunakan frasa dan bahasa yang dipilih secara hati-hati oleh peneliti. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat disusun secara logis dan

terstruktur secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Sementara itu, penyajian data dalam bentuk grafik memberikan visualisasi yang lebih jelas dan dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami mengenai hubungan antar variabel atau tren yang ada dalam data penelitian tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian disampaikan secara sistematis dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek yang diangkat dalam penelitian telah dijawab dengan jelas dan terstruktur dalam kesimpulan, memberikan gambaran komprehensif tentang temuan dan implikasi dari penelitian tersebut.



